



Pemerintah Daerah
Kabupaten Berau

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2025



Tahun 2026

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tiada kata selain puji dan syukur Kehadirat ALLAH Subhanahu Wata'ala, yang telah memberi nikmat kekuatan, semangat dan kesehatan lahir batin sehingga kami dapat merampungkan penyusunan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025 untuk memenuhi ketentuan yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

RLPPD merupakan ringkasan laporan capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) Tahun Anggaran, yang disampaikan dan dipublikasikan oleh Kepala Daerah kepada masyarakat sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas. Tanggapan masyarakat akan menjadi bahan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya.

Program dan kegiatan yang tertuang dalam APBD Kabupaten Berau Tahun 2025 dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana sehingga beberapa target kinerja pembangunan dapat tercapai meskipun masih ditemui permasalahan yang memerlukan strategi dalam penyelesaiannya. Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Berau tercermin dari diperolehnya penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Atas nama Pemerintah Kabupaten Berau, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dukungan dan kerjasama Pimpinan serta Segenap Anggota DPRD Kabupaten Berau. Demikian pula ucapan terima kasih kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Tokoh Agama, Tokoh

Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Perempuan, Pimpinan Partai Politik, dan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Berau yang telah bersama dan berupaya mendukung program pemerintah daerah serta menciptakan situasi kondusif sehingga Kabupaten Berau mampu meraih keberhasilan diberbagai sektor kehidupan.

Sekian dan Terima Kasih

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tanjung Redeb, 30 Maret 2026

BUPATI BERAU,



Hj. SRI JUNIARSIH MAS, M.Pd

I. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Pembangunan daerah pada hakikatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mengelola sumber daya ekonomi daerah. Pembangunan daerah juga merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju dan tenteram. Selain itu, dari hasil pembangunan diharapkan dapat memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat dalam rangka peningkatan harkat, martabat dan harga diri. Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir dari proses pembangunan di suatu daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penentuan prioritas pembangunan dalam pembangunan daerah merupakan suatu kondisi yang harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Daerah harus mampu mengidentifikasi potensi-potensi yang dimilikinya, kendala-kendala yang akan dihadapi dan peluang-peluang yang ada untuk dapat merencanakan pembangunan daerah secara tepat. Pembangunan daerah dilaksanakan melalui penguatan otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Pelaksanaan pembangunan daerah yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari tiga pilar yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Dalam melaksanakan pembangunan daerah terlebih dahulu diperlukan adanya perencanaan. Dimanakan fungsi yang sangat penting & strategis, karena dengan perencanaan kita bisa melihat daerah akan dibawa kemana, dengan tetap mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dilakukan dengan tetap mendasarkan pada data dan informasi yang akurat, valid dan akuntabel. Selanjutnya ketercapaian sasaran dan ketersediaan data menjadi ukuran utama yang sangat penting. Melalui data tersebut maka dihasilkan indikator-indikator yang dapat digunakan dalam proses menyusun perencanaan dan evaluasi mengukur keberhasilan pembangunan daerah.

Indikator yang seringkali digunakan oleh pemerintah daerah untuk maksud diatas adalah indikator ekonomi makro yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik yang meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, dan ketimpangan pendapatan. Adapun ringkasan indikator ekonomi makro Kabupaten Berau tahun 2024-2025 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 1.1 Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Berau, 2024-2025

No	Indikator Ekonomi Makro	Satuan	2024	2025
1	Indeks Pembangunan Manusia	-	77,17	77,72
2	Persentase penduduk Miskin	Persen	5,08	4,44
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,15	4,40
4	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	7,28	2,48
5	PDRB Per-Kapita ADHB	Juta Rupiah	194,08	193,39
6	Ketimpangan Pendapatan	-	0,317	0,294

Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau, 2026

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia merupakan tujuan akhir segala macam pembangunan. Ukuran keberhasilan pembangunan manusia dapat diukur menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Dengan kata lain IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan, seperti pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM sendiri dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*). Untuk dimensi umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian

menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi.

Dimensi pengetahuan diukur melalui indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur 7 tahun di masa mendatang. Adapun Rata-rata Lama Sekolah adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Sementara itu dimensi standar hidup layak digambarkan oleh Pengeluaran per Kapita Disesuaikan, yang nilainya ditentukan dari pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

Tabel 1.2 Perkembangan IPM Regional Kalimantan Timur, 2021-2025

No	Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024	2025
1	Paser	73,34	73,85	74,56	75,13	75,85
2	Kutai Barat	72,31	73,16	73,97	74,76	75,38
3	Kutai Kartanegara	74,69	75,31	75,95	76,57	77,25
4	Kutai Timur	74,15	74,69	75,33	75,9	76,48
5	Berau	75,69	76,24	76,71	77,17	77,72
6	Penajam Paser Utara	73,01	73,56	74,33	74,94	75,82
7	Mahakam Ulu	68,36	69,17	70,02	70,79	71,53
8	Kota Balikpapan	81,07	81,49	82,03	82,62	83,23
9	Kota Samarinda	81,05	81,72	82,61	83,11	83,53
10	Kota Bontang	80,65	81	81,63	82,49	83,04
	Kalimantan Timur	75,94	76,6	77,36	78,79	79,93

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau, 2026

Jika ingin melihat capaian derajat kesejahteraan masyarakat dengan membandingkan antar Kabupaten dalam Provinsi Kalimantan Timur. Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur cukup relatif bervariasi. Berdasarkan pengelompokan IPM, terdapat tiga kota yang berstatus IPM “sangat tinggi” yaitu Samarinda, Balikpapan dan Bontang yang memiliki angka IPM di atas IPM Kalimantan Timur yang

sebesar 79,93. Sedangkan Kabupaten lainnya memiliki IPM “tinggi. Secara peringkat, IPM Kabupaten Berau tahun 2025 yang sebesar 77,72, menempati urutan ke empat dan masih berada di bawah angka Provinsi Kalimantan Timur. IPM Kabupaten Berau cenderung mengalami peningkatan selama kurun waktu lima tahun terakhir. Hal ini sejalan dengan IPM provinsi yang juga cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan ini mencerminkan bahwa semakin baiknya akses masyarakat untuk memperoleh kesehatan, pendidikan dan pendapatan. Hal ini terlihat dari data jumlah fasilitas kesehatan dan pendidikan yang semakin meningkat walaupun di beberapa kecamatan masih ada yang perlu ditingkatkan lagi.

Selanjutnya pada Tabel 1.3 memperlihatkan perbandingan IPM Kabupaten Berau dengan IPM Provinsi Kalimantan Timur dan IPM Nasional. Terlihat bahwa IPM Kabupaten Berau masih lebih rendah dari IPM Provinsi Kalimantan Timur, namun lebih tinggi dari IPM level nasional. Hal ini sudah menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Kabupaten Berau telah berlangsung baik, namun hal ini tidak lantas membuat Kabupaten Berau berbangga diri, tetapi akan tetap melanjutkan peningkatan pembangunan daerah.

Tabel 1.3 Perkembangan IPM Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional, 2024-2025

No	Uraian	2024	2025	Perubahan
1	IPM Kabupaten Berau	77,17	77,72	0,71%
2	IPM Provinsi Kalimantan Timur	78,79	79,93	1,45%
3	IPM Nasional	75,02	75,90	1.17%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau, 2026

b. Persentase penduduk Miskin

Sejak mandat tata kelola pemerintahan yang mandiri diberikan kepada pemerintah daerah atau yang dikenal dengan desentralisasi, pemerintah daerah berhak untuk menentukan kebijakan otonomi atas daerah masing-masing. Kebijakan-kebijakan yang diambil diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui fasilitas-fasilitas publik yang layak dan memadai guna membantu penduduk yang ada pada kabupaten/kota. Secara umum, kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan hendaknya selaras dengan kebijakan-kebijakan untuk menekan angka kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kendati kesejahteraan tidak mutlak dapat dinyatakan dalam indikator kemiskinan, kemiskinan tetap mampu menjadi salah satu indikator yang kontradiktif dengan label masyarakat yang sejahtera

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkalori per kapita per hari. Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Head Count Index (HCI-P0) adalah persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK). Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan-P2 menggambarkan ketimpangan di kalangan masyarakat miskin. Ini hanyalah jumlah kesenjangan kemiskinan yang tertimbang, dimana bobotnya adalah kesenjangan kemiskinan proporsional itu sendiri. Oleh karena itu, dengan mengkuadratkan indeks kesenjangan kemiskinan, pengukuran tersebut secara implisit memberi bobot lebih pada pengamatan yang berada jauh di bawah garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan semakin tinggi ketimpangan pada masyarakat miskin.

Tabel 1.4 Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Berau, 2020-2025

Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2020	568.500	12.30	5.19
2021	595.550	13.62	5.88
2022	624,948	13.31	5.65
2023	677,819	13.26	5.54
2024	731.250	12.35	5.08
2025	753,416	10.96	4.44

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau, 2026

Jika melihat Tabel 1.4 sepanjang tahun 2020 hingga 2025 Garis Kemiskinan (GK) Kabupaten Berau menunjukkan tren peningkatan. Berada pada rentang 500-700 ribuan per kapita per bulan, pada tahun 2024 GK ini meningkat hingga

mencapai Rp. 731.250,00 per kapita per bulan dan meningkat lagi menjadi Rp. 753.416 perkapita pada tahun 2025, dimana hal ini menunjukkan peningkatan standar hidup masyarakat Berau. Peningkatan GK bisa diindikasikan sebagai adanya peningkatan standar hidup minimum yang didukung oleh inflasi atau kenaikan atas harga-harga. Peningkatan GK yang tidak disertai dengan peningkatan pendapatan, riskan untuk menghasilkan keluaran analisis berupa peningkatan jumlah penduduk miskin yang cukup banyak pada suatu wilayah. Sebab, dengan pendapatan yang tidak bertambah penduduk yang semula dapat dikategorikan tidak miskin menjadi tergeser menjadi miskin dengan batas minimum yang semakin meningkat.

Penurunan ini juga sejalan dengan persentase penduduk miskin yang turun 0,64 poin persen mencapai 4,44 persen pada tahun 2025. Rapor hijau atas kemiskinan ini tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang diimplementasikan. Arah kebijakan dalam RPJMD 2021-2026 Kabupaten Berau yang secara nyata dapat dilihat untuk menekan angka kemiskinan yaitu, melalui penjagaan atas daya beli masyarakat dengan cara mempercepat belanja pemerintah daerah dan dana desa, BLT, subsidi, dan relaksasi pajak. Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong aktivitas produksi melalui dukungan pada sektor-sektor perekonomian unggulan seperti sektor pariwisata dan pertanian. Selanjutnya, pada bidang pendidikan pemerintah daerah juga melakukan peningkatan kualitas dan pendistribusian tenaga pendidik dan kependidikan. Salah satu wujud nyata atas perencanaan ini ialah diberikannya peningkatan Insentif Untuk Kader Posyandu, Tenaga Kesehatan, PTT, Ketua RT & Pembimbing Rohani dan Tenaga Pendidikan (Guru Sekolah dan PAUD).

Selanjutnya, jika dibandingkan dengan persentase kemiskinan Propinsi Kalimantan Timur dan Nasional, persentase kemiskinan Kabupaten Berau masih memiliki angka yang lebih rendah, dimana pada tahun 2025 propinsi Kalimantan Timur sebesar 5,17 persen dan nasional 8,47 persen sedangkan Kabupaten Berau hanya sebesar 4,44 persen.

Tabel 1.5 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dan Nasional, 2024-2025

No	Tingkat Kemiskinan	2024	2025	Perubahan
1	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Berau	5,08	4,44	0,64
2	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Berau	12,35	10,96	1,39
3	Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Timur	5,78	5,17	0,61
4	Persentase Penduduk Miskin Nasional	9,03	8,47	0,56

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau, 2026

c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Penduduk dapat dikatakan sebagai aspek ketersediaan (*supply*) bagi pasar tenaga kerja di suatu daerah. Sehingga keberadaan penduduk menjadi salah satu komponen penting dalam kegiatan ekonomi. Namun, tidak semua penduduk dapat memasuki pasar tenaga kerja. Karena ada syarat tertentu seperti harus berusia kerja. Sehingga data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting bagi penyusunan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan nasional dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan yang baik dan benar sangat ditentukan oleh kondisi ketersediaan data dan informasi ketenagakerjaan. Selain itu, data dan informasi mengenai ketenagakerjaan juga dapat mencerminkan tingkat pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan. Salah satu data ketenagakerjaan yang sangat penting digunakan untuk mendukung perkembangan ketenagakerjaan yang berkelanjutan adalah pengangguran.

Perkembangan pengangguran di Kabupaten Berau dapat dilihat dari beberapa indikator. Salah satu indikator yang sering digunakan untuk mencerminkan kondisi pengangguran di suatu daerah adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang dapat menilai keberhasilan kinerja pembangunan di bidang ketenagakerjaan. TPT merupakan suatu nilai yang menunjukkan jumlah penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin mendapatkan

pekerjaan, atau sudah punya pekerjaan tetapi belum memulai bekerja terhadap jumlah angkatan kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Berau pada Tahun 2024 menempati lima terendah di Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 5,15 persen dan lebih tinggi dari TPT Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 5,14 persen. Kemudian pada tahun 2025 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Berau mengalami penurunan kembali yang mencapai 4,40 Persen.

d. Pertumbuhan Ekonomi

Pada dasarnya pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi, dalam arti bahwa pembangunan ekonomi mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi akan memperlancar proses pembangunan ekonomi. Dalam hal ini pertumbuhan dapat berupa pengembangan/peluasan (*expansion*) atau peningkatan (*improvement*) dari aktivitas yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi bertambah. Secara matematis, pertumbuhan ekonomi diperoleh dari perubahan nilai total PDRB tahun berjalan dibandingkan dengan nilai total PDRB tahun sebelumnya dimana dihitung berdasarkan nilai PDRB atas dasar harga konstan. Melalui penghitungan ini, angka pertumbuhan yang diperoleh semata-mata mencerminkan pertumbuhan riil yang dihasilkan oleh aktivitas perekonomian pada periode tertentu dengan menghilangkan pengaruh perubahan harga. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian sebaliknya apabila negatif menunjukkan adanya penurunan

Dalam kondisi perekonomian yang meningkat, jika angka pertumbuhan ekonomi tahun berjalan lebih besar dari pertumbuhan tahun sebelumnya. maka dapat dikatakan terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi. Namun. jika angka pertumbuhan ekonomi tahun berjalan lebih kecil dari pertumbuhan tahun sebelumnya. mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut

melambat. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Berau menunjukkan pergerakan yang berfluktuasi selama tahun 2021 sampai dengan 2025.

Tabel 1.7 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Berau Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen). 2021-2025**

Kode	Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024*	2025**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.99	2.92	2.18	1.92	3.24
B	Pertambangan dan Penggalian	7.04	3.31	5.74	7.88	-0.45
C	Industri Pengolahan	-3.09	3.63	4.07	4.18	6.47
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.69	3.34	8.38	12.2	9.07
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4.13	5.75	5.51	7.51	5.44
F	Konstruksi	0.75	7.34	9.1	10.21	3.65
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.4	6	5.34	6.83	10.89
H	Transportasi dan Pergudangan	5.16	6.1	6.35	7.64	6.53
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.48	7.72	5.63	9.44	15.36
J	Informasi dan Komunikasi	6.44	6.31	5.39	7.78	14.27
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.27	8.53	10.23	8.24	3.82
L	Real Estat	1.94	2.85	1.29	4.55	7.55
M,N	Jasa Perusahaan	6.01	5.17	6.14	7.63	10.64
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	0.74	6.26	9.41	24.36	19.68
P	Jasa Pendidikan	4.54	4.77	4.07	5.27	9.18
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	21.14	4.73	4.81	4.89	9.26
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1.94	6.84	5.95	8.22	9.04
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	5.36	3.95	5.44	7.28	2.48

*Keterangan : *Angka Sementara*

*** Angka Sangat Sementara*

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau. 2026

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Berau pada tahun 2025 tercatat sebesar 2,48 persen mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 7,28 persen. Lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebagai kontributor terbesar dalam PDRB Kabupaten Berau, mengalami penurunan sebesar -0.45 dibanding tahun sebelumnya sebesar 7,88 persen pada tahun 2024.

e. PDRB Perkapita

Dari series data PDRB dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB. salah satunya adalah PDRB per kapita. PDRB per kapita merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat pemerataan. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk di suatu daerah. rata-rata mampu menciptakan nilai tambah sebesar PDRB per kapita tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu daerah. Besar kecilnya nilai PDRB per kapita sangat dipengaruhi jumlah penduduk. Untuk dapat meningkatkan nilai PDRB per kapita. suatu daerah harus dapat meningkatkan nilai PDRB yang lebih besar dibandingkan dengan peningkatan jumlah penduduk. Namun sesungguhnya. PDRB per kapita ini tidak serta menunjukkan bahwa setiap penduduk memiliki peran produktif dalam menciptakan nilai tambah.

PDRB per kapita ini hanya memberikan gambaran secara keseluruhan tanpa mempertimbangkan apakah penduduk tersebut benar-benar terlibat dalam suatu kegiatan ekonomi. Meskipun demikian. setidaknya indikator ini dapat memberikan gambaran awal perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat secara makro. PDRB per kapita yang meningkat menunjukkan bahwa persentase kenaikan PDRB nominal lebih besar dibandingkan persentase penambahan penduduk. Sedangkan PDRB per kapita yang menurun

menunjukkan bahwa persentase kenaikan PDRB nominal lebih kecil dari persentase penambahan jumlah penduduk atau karena PDRB nominal yang mengalami penurunan.

Tabel 1.8 PDRB Per Kapita Kabupaten Berau Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah). 2021-2025**

Indikator	2021	2022	2023	2024*	2025**
PDRB ADHB Per Kapita	171,49	236,23	198,53	194,08	193,39

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau, 2026

Berdasarkan Tabel 1.8 dapat terlihat bahwa PDRB per kapita Kabupaten Berau pada tahun 2025 mencapai **193,39** juta rupiah. Menurun dibandingkan tahun 2024 yang sebesar **194,08** juta rupiah. Angka ini berarti bahwa secara ekonomi setiap penduduk di Kabupaten Berau, rata-rata mampu menciptakan nilai tambah sebesar **193,39** juta rupiah selama tahun 2025.

f. Ketimpangan Pendapatan

Tujuan terpenting dari suatu pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi penduduk. Kondisi ini dapat tergambarkan melalui penurunan angka kemiskinan, dimana hal ini dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan distribusi pendapatan yang lebih merata. Strategi pembangunan yang hanya terfokus pada peningkatan laju pertumbuhan ekonomi tanpa disertai pendistribusian pendapatan yang lebih merata akan menyebabkan pertumbuhan hanya dinikmati oleh sekelompok golongan masyarakat sehingga timbul ketimpangan yang semakin besar. Menurut Siregar (2006), pertumbuhan ekonomi hendaknya menyebar di setiap golongan pendapatan, termasuk golongan miskin (*growth with equity*) sehingga pertumbuhan efektif dalam menurunkan kemiskinan. Oleh karena itu, muncul sebuah gagasan baru untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang dapat berpihak pada penduduk miskin (*pro-poor growth*).

Menurut Bappenas (2004). kemiskinan dan ketimpangan merupakan konsep yang berbeda. tetapi keduanya seringkali digunakan bersamaan dalam analisis kemiskinan karena adanya keterkaitan yang ketat antar keduanya. Kemiskinan mengacu pada kondisi keterbelakangan dalam berbagai bentuk (pendapatan, pemenuhan kebutuhan dasar dan kapabilitas). sedangkan ketimpangan mengacu pada distribusinya di antara anggota suatu kelompok masyarakat dan daerah. Dalam banyak kasus kemiskinan dipengaruhi oleh ketimpangan distribusi ekonomi baik oleh struktural maupun natural. Karena itu, indikator kemiskinan dan ketimpangan seringkali digabungkan dalam analisis dan penilaian kemiskinan.

Koefisien gini (*gini ratio*) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan. Koefisien gini sebagai ukuran distribusi pendapatan memiliki nilai antara 0 dan 1. Jika suatu distribusi pendapatan semakin merata jikai nilai koefisien gini mendekati nol. Sebaliknya, suatu distribusi pendapatan dikatakan tidak merata jika nilai koefisien gini mendekati satu. Apabila nilai koefisien gini mendekati 0, kesenjangan distribusi pendapatan dianggap rendah. Sebaliknya, apabila nilai koefisien gini mendekati 1, maka kesenjangan distribusi pendapatan tinggi. Untuk mengetahui ketimpangan distribusi pendapatan kelompok masyarakat, koefisien gini dibagi ke dalam tiga kategori yaitu:

- Koefisien Gini > 0.50 : Tingkat ketimpangan tinggi
- Koefisien Gini 0.40 - 0.50 : Tingkat ketimpangan sedang
- Koefisien Gini < 0.40 : Tingkat ketimpangan rendah

Tabel 1.9 Perkembangan Koefisien Gini di Kabupaten Berau. 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Koefisien Gini	0,377	0,352	0,327	0,317	0,294

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau, 2026

Rasio gini Kabupaten Berau selama lima tahun terakhir berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah, selalu berada di bawah 0,40. Rasio gini terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 sebesar 0,327, turun menjadi 0,317 pada tahun 2024, dan pada tahun 2025 turun kembali sebesar 0,294. Penurunan ini menunjukkan indikasi yang positif. Penurunan rasio gini pada tahun 2025, tidak terlepas dari penurunan jumlah penduduk miskin dan pergeseran distribusi pendapatan penduduk menuju kelompok yang tertinggi. Rasio gini yang terus menunjukkan tren negatif lambat laun akan menuju area konsentrasi maksimum yang artinya pendapatan telah terdistribusi secara merata.

II. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Capaian kinerja pelaksanaan urusan pelayanan dasar Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025 dalam laporan ini memuat capaian kinerja kunci pada urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta urusan sosial sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri dalam negeri Nomor : 100.2.1.7-109 Tahun 2026 Tanggal 27 Januari 2026 Tentang Indikator Kinerja Kunci, Bobot dan Penilaian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun capaian kinerja pelaksanaan urusan pelayanan dasar Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025 tergambar sebagai berikut:

a. Urusan Pendidikan

Capaian penyelenggaran urusan Pendidikan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Kabupaten Berau sebagai berikut:

Tabel 2.1 Capaian penyelenggaran urusan Pendidikan Tahun Anggaran 2025

Indikator Kinerja Kunci	Rumus Persamaan	Isian Data	Capaian Kinerja
1. Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	$\frac{\text{Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini}}{\text{Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada Kabupaten yang bersangkutan}} \times 100\%$	8.900 -----x100 11.907	74,75
2. Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasardalam pendidikan	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dasar	34.622 -----x100 35.892	96,46

Indikator Kinerja Kunci		Rumus Persamaan	Isian Data	Capaian Kinerja
	dasar	----- x 100% Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan		
3	Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan ----- x 100% Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah	16.140 -----x100 17.145	94,14
4	Persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	Jumlah toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik ----- x 100% Jumlah seluruh toilet	797 -----x100 3.064	26,01
5	Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik ----- x 100% Jumlah ruang kelas		

Sumber : Dinas Pendidikan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil, 2026

b. Urusan Kesehatan

Capaian penyelenggaraan urusan Kesehatan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Kabupaten Berau sebagai berikut:

Tabel 2.2 Capaian penyelenggaraan urusan Kesehatan TA 2025

Indikator Kinerja Kunci		Rumus Persamaan	Isian Data	Capaian Kinerja
1	Persentase kematian ibu	Jumlah kematian ibu tahun 2025 ----- x100 Jumlah ibu melahirkan tahun 2025	3 ----- x 100 4.535	0,07
2	Persentase pelayanan kesehatan penderita	Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerja	12.600 -----x100	72,57

Indikator Kinerja Kunci	Rumus Persamaan	Isian Data	Capaian Kinerja
	<p>hipertensi sesuai standar</p> <p>Kabupaten yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun ----- x 100%</p> <p>Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi Kabupaten dalam kurun waktu satu tahun yang sama</p>	17.362	
3	<p>Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar</p> <p>Jumlah penderita diabetes melitus usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerja Kabupaten yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun ----- x 100%</p> <p>Jumlah estimasi penderita diabetes melitus usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerja Kabupaten berdasarkan angka prevalensi Kabupaten dalam kurun waktu satu tahun yang sama.</p>	<p>3.838</p> <p>-----x100</p> <p>4.493</p>	85,42
4	<p>Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar</p> <p>Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa berat di wilayah kerja Kabupaten yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun ----- x 100%</p> <p>Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja Kabupaten dalam kurun waktu satu tahun yang sama</p>	<p>230</p> <p>-----x100</p> <p>230</p>	100
5	<p>Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai standar</p> <p>Jumlah orang terduga Tuberkulosis yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun ----- x 100%</p> <p>Jumlah perkiraan orang yang terduga Tuberkulosis dalam kurun waktu satu tahun yang sama.</p>	<p>7.247</p> <p>-----x100</p> <p>7.247</p>	100
6	<p>Persentase pelayanan kesehatan orang dengan</p> <p>Jumlah orang dengan risiko terinfeksi Human Immunodeficiency Virus</p>	<p>6.864</p> <p>-----x100</p>	100

Indikator Kinerja Kunci		Rumus Persamaan	Isian Data	Capaian Kinerja
	risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun ----- x 100% Jumlah orang dengan risiko terinfeksi Human Immunodeficiency Virus di Kabupaten dalam kurun waktu satu tahun yang sama	6.864	
7	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Jumlah balita umur 0 sampai 59 bulan dengan panjang badan atau tinggi badan kurang dari -2 Standar deviasi pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu ----- x 100% Jumlah balita umur 0 sampai 59 bulan yang diukur panjang badan atau tinggi badan pada suatu wilayah dan kurun waktu yang sama	1.853 -----x100 9.315	19,89
8	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja Kabupaten tersebut dalam kurun waktu satu tahun (nominator) ----- x 100% Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja Kabupaten tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	3.987 -----x100 4.891	81,52
9	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja Kabupaten dalam kurun waktu satu tahun ----- x 100% Jumlah warga negara usia 60 tahu keatas di kabupaten / kota	4.535 -----x100 4.891	92,72
10	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun ----- x 100% Jumlah sasaran bayi baru lahir di	3.943 -----x100 4.615	85,44

Indikator Kinerja Kunci		Rumus Persamaan	Isian Data	Capaian Kinerja
		wilayah kerja Kabupaten tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama		
11	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 1 + jumlah balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2 + balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar 3 ----- x 100% Jumlah balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja Kabupaten tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama	14.276 -----x100 18.396	77,60
12	Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja Kabupaten dalam kurun waktu satu tahun ajaran ----- x 100% Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja Kabupaten tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama	36.633 -----x100 38.299	95,65
13	Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	Jumlah orang usia 15–59 tahun di Kabupaten yang mendapatkan layanan kesehatan produktif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun ----- x 100% Jumlah orang usia 15–59 tahun di Kabupaten dalam kurun waktu satu tahun	72.957 -----x100 178.990	40,76
14	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di suatu wilayah kerja Kabupaten dalam kurun waktu satu tahun (nominator) ----- x 100% Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu	12.793 -----x100 20.307	62,99

Indikator Kinerja Kunci	Rumus Persamaan	Isian Data	Capaian Kinerja
	wilayah kerja Kabupaten dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator)		

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Berau, 2026

c. Urusan Pekerjaan Umum

Capaian penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang diselenggarakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut :

Tabel 2.3 Capaian penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum TA 2025

Indikator Kinerja Kunci	Rumus Persamaan	Isian Data	Capaian Kinerja	
1	Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota	Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik (Ha) ----- x 100% Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten (Ha)	350 ----x100 1.278	27,38
2	Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota	Jumlah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah dinilai pelaksanaannya dalam waktu 1 tahun ----- x 100% Jumlah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan dalam waktu 1 tahun	29 ----x100 29	100
3	Persentase kemantapan jalan kabupaten/kota	(Panjang jalan kondisi baik + panjang jalan kondisi sedang) panjang jalan kewenangan kabupaten (Km) ----- x 100% Panjang jalan kewenangan Kabupaten (Km)	554,22 ----- x100 308.020	38,66
4	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk +	247.466 -----x100	80,34

	Indikator Kinerja Kunci	Rumus Persamaan	Isian Data	Capaian Kinerja
	akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di Pengolahan Lumpur Tinja + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik ----- x 100% Jumlah total penduduk kabupaten	61.359	
5	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD ----- x 100% Jumlah rumah di kabupaten	54.222 -----x100 63.945	84,79
6	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang telah terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir (ha) ----- x 100% Luas kawasan permukiman rawan banjir yang telah ditentukan dalam dokumen perencanaan daerah dengan mempertimbangkan kajian risiko bencana banjir (ha)	0 -----x100 1	0
7	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota	Luas kawasan sepanjang pantai yang rawan abrasi dan banjir rob yang terlindungi infrastruktur pengaman pantai kewenangan kabupaten/kota (Ha) ----- x 100% Luas kawasan sepanjang pantai yang rawan abrasi dan banjir rob kewenangan kabupaten	1 -----x100 1	100
8	Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten/Kota	Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang digunakan sesuai peruntukannya ----- x 100%	52 -----x100 52	100

Indikator Kinerja Kunci		Rumus Persamaan	Isian Data	Capaian Kinerja
		Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku		
9	Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah	$\frac{\text{Jumlah pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang diterbitkan}}{\text{Jumlah permohonan Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk}} \times 100\%$	1 -----x100 1	100
10	Persentase tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan terlibat dalam kegiatan konstruksi pemerintah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis}}{\text{Jumlah kebutuhan tenaga kerja operator dan teknis/analisis yang terlibat dalam kegiatan konstruksi pemerintah kabupaten/kota}} \times 100\%$	367 -----x100 367	100

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau, 2026

d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Capaian penyelenggaraan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau sebagai berikut :

Tabel 2.4 Capaian penyelenggaraan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman TA 2025

Indikator Kinerja Kunci		Rumus Persamaan	Isian Data	Capaian Kinerja
1	Persentase warga negara korban bencana	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten yang mendapatkan layanan	1 -----x100	Tidak terjadi

Indikator Kinerja Kunci	Rumus Persamaan	Isian Data	Capaian Kinerja
kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	$\frac{\text{penyediaan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah pada tahun 2025}}{\text{Jumlah total rencana warga negara korban bencana kabupaten yang akan ditangani pada tahun 2025}} \times 100\%$	1	bencana yang berdampak pada Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni
2 Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	$\frac{\text{Luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani tahun N (Ha)}}{\text{Target luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha pada tahun 2025}} \times 100\%$	1,27 -----x100 1,27	100
3 Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	$\frac{\text{Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani pada tahun 2025}}{\text{Jumlah Rumah Tidak Layak Huni pada Tahun 2025}} \times 100\%$	233 -----x100 4.056	5,74
4 Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	$\frac{\text{Realisasi jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di tahun 2025}}{\text{Target jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di tahun 2025}} \times 100\%$	2 -----x100 2	100

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, 2026

e. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Capaian penyelenggaraan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Outcome di Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau sebagai berikut :

Tabel 2.6 Capaian penyelenggaraan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja TA 2025

Indikator Kinerja Kunci		Rumus Persamaan	Isian Data	Capaian Kinerja
1	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	$\frac{\text{Jumlah dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku pada tahun 2025}}{\text{Jumlah dokumen kebencanaan (Kajian Risiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana, dan Rencana Kontinjensi) yang wajib dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota = 3}} \times 100\%$	<p>3</p> <p>----- x 100</p> <p>3</p>	100
2	Persentase penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	$\frac{\text{Jumlah pengaduan Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaporkan}} \times 100\%$	<p>40</p> <p>----- x 100</p> <p>40</p>	100
3	Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	$\frac{\text{Jumlah peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi}} \times 100\%$	<p>2</p> <p>----- x 100</p> <p>2</p>	100
4	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	$\frac{\text{Jumlah warga negara dan aparatur yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana}}{\text{Jumlah warga negara yang tinggal di kawasan rawan bencana berdasarkan target yang telah ditetapkan}} \times 100\%$	<p>211.008</p> <p>----- x 100</p> <p>280.998</p>	75,09
5	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana}}{\text{Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana}} \times 100\%$	<p>11.785</p> <p>----- x 100</p> <p>11.785</p>	100
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi	$\frac{\text{Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di kabupaten}}{\text{---x100}}$	<p>49</p> <p>----x100</p>	100

Indikator Kinerja Kunci	Rumus Persamaan	Isian Data	Capaian Kinerja
korban kebakaran	$\frac{\text{dalam tingkat waktu tanggap}}{\text{Total kejadian kebakaran di kabupaten}} \times 100$	49	

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2026

f. Urusan Sosial

Capaian penyelenggaraan urusan Sosial berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang dilaksanakan di Dinas Sosial Kabupaten Berau sebagai berikut :

Tabel 2.5 Capaian penyelenggaraan urusan Sosial TA 2025

Indikator Kinerja Kunci	Rumus Persamaan	Isian Data	Capaian Kinerja
1 Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	$\frac{\text{Jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Populasi penyandang disabilitas terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti}} \times 100\%$	10 ----- x 100 10	100
2 Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	$\frac{\text{Jumlah anak terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Populasi anak terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti}} \times 100\%$	20 ----- x 100 20	100
3 Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	$\frac{\text{Jumlah lanjut usia terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Populasi lanjut usia terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti}} \times 100\%$	5 ----- x 100 5	100

	Indikator Kinerja Kunci	Rumus Persamaan	Isian Data	Capaian Kinerja
4	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah gelandangan dan pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya $\frac{\text{-----}}{\text{Populasi gelandangan dan pengemis di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti}} \times 100\%$	1 $\text{-----} \times 100$ 1	100
5	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam, sosial dan non alam kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya $\frac{\text{-----}}{\text{Populasi korban bencana alam, sosial dan non alam yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota}} \times 100\%$	1.322 $\text{-----} \times 100$ 1.322	100
6	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Jumlah penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar $\frac{\text{-----}}{\text{Populasi masyarakat miskin, fakir miskin dan kelompok rentan yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar cakupan daerah kabupaten/kota}} \times 100\%$	12.287 $\text{-----} \times 100$ 12.287	100

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Berau, 2026

III. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

a. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas LKPD Kabupaten Berau dalam 5 tahun terakhir 2020-2024 merupakan kebanggaan sekaligus pencapaian yang maksimal atas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam hal pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Prestasi ini harus terus dipertahankan dengan cara meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah, khususnya dalam transparansi pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan APBD, sehingga publik dapat mengakses informasi yang handal terkait capaian dari pengelolaan APBD Kabupaten Berau.

Tabel 3.3 Capaian Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Berau

No	Tahun LKPD	Opini BPK	Ket
1	2020	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	
2	2021	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	
3	2022	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	
4	2023	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	
5	2024	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	
6	2025	Proses Pemeriksaan BPK	

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, 2026

b. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) adalah evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. EPPD dilakukan untuk menilai kinerja keberhasilan pemerintah daerah baik secara keseluruhan maupun keberhasilan pelaksanaan masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pemerintah memberikan penghargaan berdasarkan hasil EPPD melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri RI

tentang Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional yang dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori yaitu, Status Kinerja Sangat Tinggi, Tinggi, Rendah dan Sangat Rendah. Adapun Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Berau berdasarkan hasil EPPD terhadap LPPD secara Nasional adalah sebagai berikut

Tabel 3.1 Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Nasional terhadap LPPD Kab Berau

No	Tahun Keputusan	Tahun EPPD	Tahun LPPD	Skor	Status Kinerja	Ket
1	2022	2021	LPPD TA. 2020	-	-	Tidak Ada Penilaian
2	2023	2022	LPPD TA. 2021	2,18	Rendah	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-1109 Tahun 2023 Tentang hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional tahun 2022 berdasarkan penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota tahun 2021
3	2024	2023	LPPD TA. 2022	3,1964	Sedang	Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor : 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2023 Berdasarkan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022
4	2025	2024	LPPD TA. 2023	3,4608	Tinggi	Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor : 100.2.1.7-2109 Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2024 Berdasarkan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2023
5	2026	2025	LPPD TA. 2024	-	-	Menunggu Keputusan Mendagri

Sumber : Bagian Tata pemerintahan

IV. REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

a. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Pendapatan – LRA

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah, Bendahara Penerimaan, BLUD dan Penerimaan Non RKUD yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah.

Pendapatan merupakan sumber pendanaan bagi pemerintah, demikian pula bagi pemerintah kabupaten Berau, pendapatan dapat berasal dari potensi daerah yang bersangkutan maupun dari provinsi dan pusat. Pendapatan dapat dibagi menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Anggaran dan realisasi pendapatan tersebut diatas dalam Tahun Anggaran 2024 serta realisasi Tahun Anggaran 2025 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Berau TA 2024 dan 2025

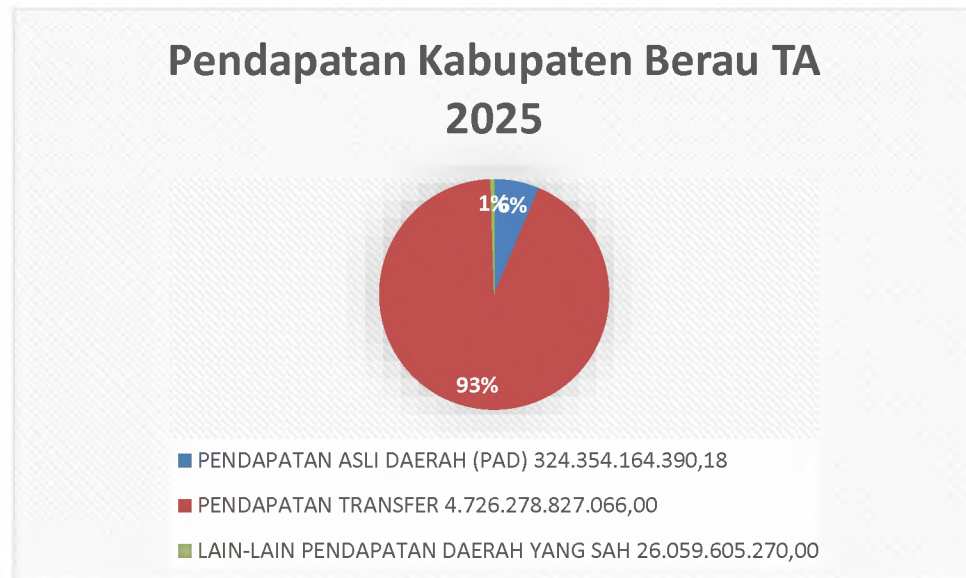
No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	401.156.435.995,00	324.354.164.390,18	80,85	343.450.025.949,60
2	PENDAPATAN TRANSFER	4.949.130.788.110,72	4.726.278.827.066,00	95,49	5.774.506.770.500,00
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	17.643.349.800,00	26.059.605.270,00	147,70	76.039.376.420,69
	Jumlah	5.367.930.573.905,72	5.076.692.596.726,18	94,57	6.193.996.172.870,29

Sumber : LRA Keuangan Pemerintahan Daerah per 23 Pebruari 2026

Tabel diatas menunjukkan bahwa Target Pendapatan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp 5.367.930.573.905,72 telah terealisasi sejumlah Rp 5.076.692.596.726,18 atau 94,57% dari target, terdapat selisih kurang sebesar Rp. 6.193.996.172.870,29 dari target yang telah ditetapkan.

Komposisi kontribusi realisasi Pendapatan Tahun 2025 terlihat sebagaimana gambar berikut:

Gambar 4.1 Perbandingan Komposisi Pendapatan Kabupaten Berau 2024



Sumber : LRA Keuangan Pemerintahan Daerah per 23 Pebruari 2026

Masing-masing realisasi akun pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Pendapatan Asli Daerah**

Realisasi Pendapatan Asli Daerah untuk periode TA 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Berau TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Pajak Daerah	175.513.778.000,00	144.942.853.267,00	82,58	91.558.760.332,00
2	Retribusi Daerah	120.583.732.356,00	110.313.931.998,96	91,48	18.110.450.696,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.997.643.845,00	11.397.496.922,15	94,99	17.986.298.143,26
4	Lain-lain PAD yang Sah	93.061.281.794,00	57.699.882.202,07	62,00	215.794.516.778,34
	Jumlah	401.156.435.995,00	324.354.164.390,18	80,85	343.450.025.949,60

Sumber : LRA Keuangan Pemerintahan Daerah per 23 Pebruari 2026

Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Berau telah menganggarkan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 401.156.435.995,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 324.354.164.390,18, mengalami kekurangan realisasi sebesar Rp 76.802.271.604,82 atau 19,82% dari target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi penurunan pendapatan sebesar Rp. 19.095.861.559,42 atau 5.56%.

2. Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 4.726.278.827.066,00. Komposisi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

Tabel 4.3 Anggaran Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Berau TA 2025 dan TA 2024

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4.027.833.198.265,72	3.961.274.326.589,00	98,34	4.959.421.374.192,00
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	921.297.589.845,00	765.004.500.477,00	83,03	815.085.396.308,00
	Total	4.949.130.788.110,72	4.726.278.827.066,00	95,49	5.774.506.770.500,00

Sumber : LRA Keuangan Pemerintahan Daerah per 23 Pebruari 2026

Dari tabel diatas Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025 direalisasikan sebesar Rp 4.726.278.827.066,00 atau 65,49% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp 4.949.130.788.110,72 Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp 1.048.227.943.434,00 atau 18,15% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024. Rincian realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan disajikan sebagai berikut :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Tabel 4. 4

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA. 2025 dan TA. 2024

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	4.847.083.601.192,00
2	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.252.374.465.265,72	3.167.813.850.753,00	97,40	0,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU)	513.054.929.000,00	559.545.218.013,00	109,06	0,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	153.873.858.000,00	143.292.027.979,00	93,12	0,00
1	Dana Desa	101.530.656.000,00	83.623.939.844,00	82,36	95.468.642.000,00
2	Insentif Fiskal	6.999.290.000,00	6.999.290.000,00	100,00	16.869.131.000,00

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4.027.833.198.265,72	3.961.274.326.589,00	98,34	4.959.421.374.192,00

Sumber : LRA Keuangan Pemerintahan Daerah per 23 Pebruari 2026

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Tabel 4.5

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2025
Kabupaten Berau

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil	583.697.589.845,00	427.404.500.477,00	73,22	459.125.396.308,00
2	Bantuan Keuangan	337.600.000.000,00	337.600.000.000,00	100,00	355.960.000.000,00
3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	921.297.589.845,00	765.004.500.477,00	83,03	815.085.396.308,00

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pemerintah Kabupaten Berau telah merealisasikan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp 26.059.605.270,00 dari target yang dianggarkan sebesar Rp 17.643.349.800,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA. 2025 dan TA. 2024

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	17.643.349.800,00	26.059.605.270,00	147,70	76.039.376.420,69
2	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada	13.339.290.200,00	12.629.276.824,00	94,67	10.420.888.331,00

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
	Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)				
3	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	0,00	13.203.878.146,00	0,00	65.618.488.089,69
4	Pendapatan Klaim Pelayanan Kesehatan/Nonkapitasi	4.304.059.600,00	226.450.300,00	5,26	0,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	17.643.349.800,00	26.059.605.270,00	147,70	76.039.376.420,69

Sumber : LRA Keuangan Pemerintahan Daerah per 23 Pebruari 2026

b. Belanja Daerah

Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah serta memenuhi kebutuhan anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan. Penggunaan anggaran dilaksanakan secara efektif dan efisien serta harus memuat target pencapaian kinerja yang terukur dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Realisasi Belanja Daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Berdasarkan fungsi, Belanja Daerah terdiri dari fungsi pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan, fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan dan perlindungan sosial.

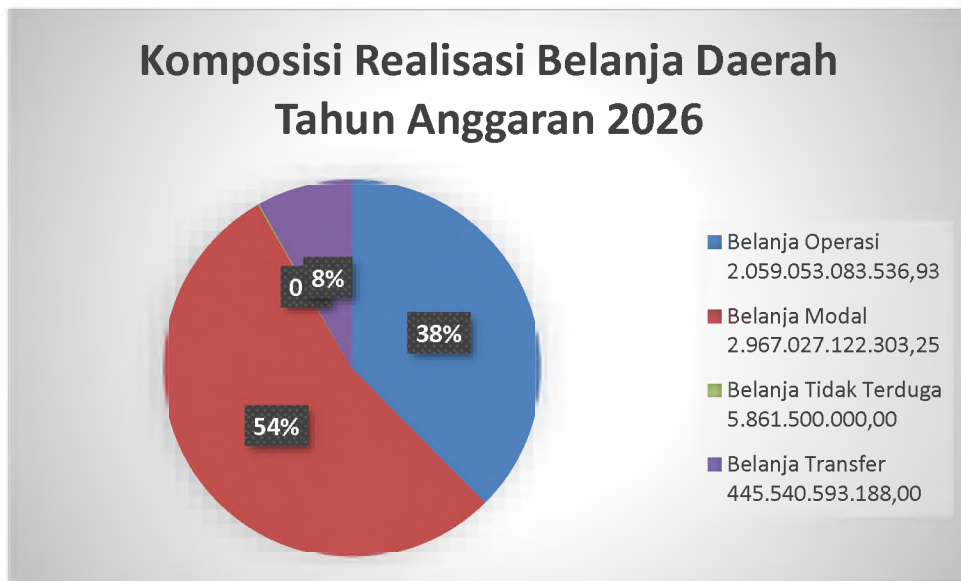
Sehubungan hal tersebut, maka pengelolaan belanja daerah menganut kebijakan pengalokasian dana dengan susunan sebagai berikut:

Tabel 4.7
 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Berau Tahun
 Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja Operasi	2.458.375.030.613,47	2.059.053.083.536,93	83,75	2.111.530.856.755,59
2	Belanja Modal	3.091.908.012.785,76	2.967.027.122.303,25	95,96	3.828.768.208.935,46
3	Belanja Tidak Terduga	27.092.917.600,77	5.861.500.000,00	21,63	5.774.799.583,00
4	Belanja Transfer	463.985.656.000,00	445.540.593.188,00	96,02	465.702.436.664,00
	Belanja Daerah	6.041.361.617.000,00	5.477.482.299.028,18	90,66	6.411.776.301.938,05

Sumber : LRA Keuangan Pemerintahan Daerah per 23 Pebruari 2026

Gambar 4.2 Komposisi Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025



Sumber : LRA Keuangan Pemerintahan Daerah per 23 Pebruari 2026

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025 telah dianggarkan sebesar Rp 6.041.361.617.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp 5.477.482.299.028,18. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 6.411.776.301.938,05 Belanja Daerah mengalami **penuirunan** sebesar Rp 934.294.002.909,87 atau 14,57%.

Berdasarkan jenis kelompoknya, Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Transfer. Perbandingan komposisi belanja daerah berdasarkan kelompoknya disajikan uraian sebagai berikut :

1) **Belanja Operasi**

Belanja Operasi dibagi ke dalam Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp 2.059.053.083.536,93. atau 83,75% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp 2.458.375.030.613,47. Realisasi Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp 52.477.773.218,66 atau 2,48% dari tahun sebelumnya. Rincian Belanja Operasi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.8 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Berau TA. 2025 dan TA. 2024

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja Pegawai	1.240.784.884.524,50	1.041.586.531.467,00	83,94	1.038.160.066.708,34
2	Belanja Barang dan Jasa	1.041.220.505.794,97	854.413.659.354,62	82,05	868.596.837.598,25
3	Belanja Hibah	166.224.640.294,00	153.051.392.715,31	92,07	189.599.952.449,00
4	Belanja Bantuan Sosial	10.145.000.000,00	10.001.500.000,00	98,58	15.174.000.000,00
	BELANJA OPERASI	2.458.375.030.613,47	2.059.053.083.536,93	83,75	2.111.530.856.755,59

Sumber : LRA Keuangan Pemerintahan Daerah per 23 Pebruari 2026

2) **Belanja Modal**

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp 2.967.027.122.303,25 atau 95,96% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp 3.091.908.012.785,76. Realisasi Belanja Modal mengalami **penurunan** sebesar Rp 861.741.086.632,21 atau 0,22% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024.

Rincian realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut

Tabel 4.9 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA. 2025 dan TA. 2024

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja Modal Tanah	15.391.573.880,00	6.937.492.376,00	45,07	1.352.415.463,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	266.970.783.032,28	252.680.070.744,00	94,64	259.968.567.330,29
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	360.389.632.338,48	336.504.620.292,25	93,37	472.685.076.375,72
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.432.439.129.612,00	2.354.928.867.530,00	96,81	3.081.747.295.756,45
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14.282.893.923,00	13.974.090.596,00	97,83	8.338.136.101,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	2.434.000.000,00	2.001.980.765,00	82,25	4.676.717.909,00
	BELANJA MODAL	3.091.908.012.785,76	2.967.027.122.303,25	95,96	3.828.768.208.935,46

Sumber : LRA Keuangan Pemerintahan Daerah per 23 Pebruari 2026

3) **Belanja Tak Terduga**

Belanja Tidak Terduga dialokasikan dalam APBD untuk kegiatan yang bersifat tidak biasa atau tidak diharapkan dalam upaya penanganan atau penanggulangan akibat dari bencana alam, bencana sosial, dan pelaksanaan kewenangan daerah. Pemerintah Kabupaten Berau menganggarkan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp 27.092.917.600,77 Terealisasi sebesar Rp 5.861.500.000,00 atau 21,63%

4) **Belanja Transfer**

Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp 465.702.436.664,00 atau 96,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp 463.985.656.000,00. Belanja Transfer mengalami **penurunan** sebesar Rp 20.161.843.476,00 atau 4,32% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 465.702.436.664,00. Rincian Belanja Transfer dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.10 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA. 2025 dan TA. 2024

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja Bagi Hasil	11.105.000.000,00	11.030.633.000,00	99,33	11.024.007.000,00
2	Belanja Bantuan Keuangan	452.880.656.000,00	434.509.960.188,00	95,94	454.678.429.664,00
	BELANJA TRANSFER	463.985.656.000,00	445.540.593.188,00	96,02	465.702.436.664,00

Sumber : LRA Keuangan Pemerintahan Daerah per 23 Pebruari 2026

V. INOVASI DAERAH

Dalam upaya memberikan Pelayanan kepada Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Berau selalu berupaya menciptakan Inovasi-inovasi baru yang dapat lebih mempermudah, mempercepat dan memberikan pelayanan prima. Inovasi-inovasi yang telah berhasil dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Berau dalam hal ini, adalah sebagai berikut :

1. Aktif Prestasi (Layanan Kolektif Petugas Registrasi Online) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah inovasi dalam pelayanan administrasi kependudukan, Masyarakat mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan secara cepat, mudah dan murah. Meminimalisir biaya yang harus dikeluarkan Masyarakat bila harus mengurus ke Kantor Disdukcapil Berau
2. Sistem Pelayanan Data Dan Pengaduan Satu Pintu pada Dinas Sosial yang memudahkan kinerja pelayanan dan meningkatkan akuntabilitas
3. JAGAU PHBS pada Puskesmas Sambaliung merupakan Inovasi yang bertujuan agar masyarakat dan aparaturnya dapat sedini mungkin mengetahui permasalahan kesehatan yang ada di masyarakat, serta mampu mengupayakan, mencegah dan menanggulangi masalah kesehatan yang didapatkan. kemudian dapat membentuk program UKBM yang diinisiasi oleh, dari dan untuk masyarakat, Seluruh siklus hidup mendapatkan akses/pelayanan kesehatan yang adil dan merata. Meningkatnya pengetahuan, kemauan dan kemampuan anggota rumah tangga untuk melakukan PHBS, juga dapat Meningkatkan peran aktif kemandirian masyarakat dalam gerakan PHBS
4. Si Bang Koko Mantap pada Dinas Perkebunan yang Memberikan dukungan dan mewujudkan Program Penguatan Ketahanan Pangan Daerah dimana Kakao merupakan bagian dari komoditas pangan yang digunakan untuk bahan dasar industri pengolahan pangan
5. KOPI DANGDUT ASIK (Kolaboratif Pengelolaan Udang Windu Tiger Berbasis Kawasan) pada Dinas Perikanan merupakan keberlanjutan

usaha budidaya tambak di kawasan budidaya udang windu, menciptakan keseimbangan antara sisi ekonomi dan ekologi, Penyerapan tenaga kerja lokal, Dukungan program kegiatan budidaya oleh DKP Provinsi Kalimantan Timur, Dukungan program revitalisasi, Peningkatan PDRB sektor perikanan, Dampak sosial ekonomi bagi pelaku usaha budidaya/ petambak dan multi player effect bagi masyarakat lokal, Tata Kelola kawasan budidaya udang yang terintegrasi dan Mendukung program karbon di kawasan budidaya tambak.

6. SIDIKMAS (Sistem Informasi Pendidikan Masyarakat) pada Dinas Pendidikan yang merupakan sebuah aplikasi yang dibuat dengan tujuan untuk agar dapat memudahkan kepada masyarakat dalam melakukan legalisir ijazah pendidikan kesetaraan (Paket A, B dan C) serta aplikasi ini juga memuat informasi lembaga yang mengeluarkan ijazah, pemilik ijazah dan tahun penerbitan ijazah pendidikan kesetaraan (Paket A, B dan C) secara online dan dapat mencetak arsip ijazah untuk kebutuhan lainnya seperti lampiran kehilangan ijazah asli sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) di Kepolisian, Aplikasi ini berjalan secara real-time selama 24 Jam dan dapat diakses dimana saja, Khususnya Seksi Kesetaraan, Pendidikan Masyarakat serta Bahasa dan Sastra
7. SIDIRGA KALTIM pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang merupakan sistem berbasis web digunakan untuk menampung data Standar Harga sebagai acuan awal perencanaan dan penganggaran. Sidirga merupakan jembatan untuk memudahkan OPD menginput data RKBMD sebelum dimasukkan di Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). melalui aplikasi Sidirga kedepan perencanaan akan kebutuhan RKBMD akan lebih baik lagi dalam hal penganggaran semua kegiatan bisa terukur
8. WISATA BEDARI (Wisata Biatan Destinasi Berbasis Alam, Desa dan Kearifan Lokal) pada Kecamatan Biatan yang memberikan manfaat

Mendukung Program Unggulan Bupati Kabupaten Berau satu dari 18 Program Prioritas Pemerintah Kabupaten Berau tentang Pengembangan Pariwisata Kabupaten Berau Wisatawan dapat menikmati perjalanan wisata. masyarakat menjadikan biatan sebagai tujuan wisata dan dekat serta meningkatnya ekonomi dan budaya lokal masyarakat Biatan

9. SIPOMED (Sistem Pendaftaran online dan telemedicine) pada RSUD Abdul Rivai yang memberikan manfaat meringankan beban loket pendaftaran, mempercepat proses pelayanan, pasien tidak perlu antri screening covid 19, memudahkan pasien, tidak perlu antri di loket pendaftaran, pasien dapat langsung antri di poliklinik serta kepastian layanan dengan berbagai variasi layanan pendaftaran
10. Mendamba RIRA pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengarah pada percepatan Kabupaten Berau menuju Kabupaten Layak Anak dengan melakukan pendampingan pada pusat kreativitas anak melalui rumah ibadah dengan konsep inovasi bukan membangun rumah ibadah baru, tetapi bagaimanapun memanfaatkan rumah ibadah yang sudah ada untuk pemenuhan hak anak serta memanfaatkan waktu luang dalam bentuk kegiatan positif, inovatif dan kreatif (PIK) terintegrasi dengan kegiatan rumah ibadah sekaligus mendekatkan anak dengan agamanya.
11. Sistem Informasi Pemetaan Pertanahan (SIPP) pada Kecamatan Tanjung Redeb merupakan Sistem Aplikasi Digital sebagai antisipasi masalah tanah dan mempermudah informasi serta pemantauan mengenai lokasi bidang tanah, posisi lahan warga, dan titik koordinat lahan bidang tanah
12. PIKATI (Peluang Integrasi dan Kolaborasi untuk Transformasi Investasi di Kabupaten Berau) pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu yang merupakan integrasi dan Kolaborasi Investasi sebagai bukti nyata koordinasi lintas perangkat daerah dalam transformasi Investasi. Masyarakat dan/atau Penanam Modal yang menerima Pemberian Insentif atau Pemberian Kemudahan mendapatkan

kepastian hak, hukum dan perlindungan. Mendapatkan Informasi dan pelayanan pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal

13. SIWALET (Sistem Informasi Wadah Aplikasi Elektronik Terintegrasi) pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu yang memiliki keunggulan Efisiensi Waktu; Proses yang lebih cepat dan sistematis mengurangi waktu menunggu untuk mendapatkan izin, Transparansi; Pengguna dapat dengan mudah memantau proses permohonan, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap sistem penerbitan izin dan Aksesibilitas; Aplikasi ini dapat diakses kapanpun dan dimana saja sehingga memberikan kemudahan bagi pengguna yang memiliki keterbatasan waktu.

VI. PENUTUP

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Berau Tahun 2024 disusun sebagai media untuk mengkomunikasikan dan menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2024 kepada masyarakat.

Secara garis besar, RLPPD Kabupaten Berau berupaya menggambarkan capaian kinerja keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun terakhir yaitu tahun 2025.

Demikian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Berau Tahun 2024 ini disampaikan. Kami selaku penyelenggara pemerintahan, menyadari bahwa dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, sepenuhnya belum bisa memuaskan semua pihak/stakeholder dan masih banyak yang perlu kita perbaiki bersama. Untuk itu, kami pun membuka hati untuk menerima kritik, saran, serta masukan yang konstruktif dari semua pihak. Untuk mencapai keberhasilan tersebut perlu adanya komitmen yang kuat dan konsistensi semua pihak, baik Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan juga Pemerintah Pusat, didukung dengan semangat kebersamaan seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkan cita-cita bersama.

Terima Kasih Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Bagian Tata Pemerintahan
Sekretariat Daerah
Kabupaten Berau

2026